

**“PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF INDONESIA”**

PROPOSAL SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

WIFA AFRIDA JUMIATI

2021/21060194

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

DAPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

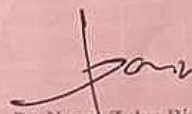
PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA

Nama : Wifa Afrida Jumiati
NIM/FM : 21060194/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 26 Agustus 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh
Pembimbing,



Dr. Novva Zulva Riani, S.E., M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001



Yenniwan, SE, ME,
NIP. 19760222 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

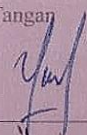
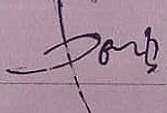
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA

Nama : Wifa Afrida Jumiati
NIM/TM : 21060194/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, ~~20~~ Agustus 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Yeniwati, SE, ME.	1. 
2	Anggota	: Dr. Novya Zulva Riani, S.E, M.Si	2. 
3	Anggota	: Maizul Rahmizal, SE., M.Sc.	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wifa Afrida Jumiaty
NIM/Tahun Masuk : 21060194/2021
Tempat, Tanggal Lahir : Pekonina, 04 April 2003
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Pekonina, Kampung Baru, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat
No.HP/Telepon : 082386696488
Judul Skripsi : Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

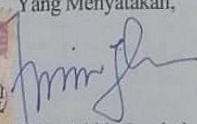
1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Kepala Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2025

Yang Menyatakan,




Wifa Afrida Jumiaty
NIM: 21060194

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesenjangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan distribusi konsumsi memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Ketimpangan dalam tiga sektor tersebut dapat memengaruhi kualitas modal manusia dan kapasitas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sehingga berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana ketimpangan gender berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2013–2023. Variabel yang digunakan meliputi rasio keluhan kesehatan, rasio rata-rata lama sekolah, dan rasio pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki. Model dipilih berdasarkan serangkaian uji seperti Chow Test dan Hausman Test yang menunjukkan bahwa FEM merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh spesifik antarprovinsi yang tidak dapat diamati secara langsung.

Hasil ini menunjukkan bahwa memperkecil kesenjangan gender khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan distribusi konsumsi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia dan kerangka pembangunan inklusif, yang menekankan bahwa kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bergantung pada kesempatan yang adil dan partisipasi yang inklusif secara gender.

Kata Kunci : pembangunan ekonomi inklusif, ketimpangan gender pada kesehatan, ketimpangan gender pada pendidikan, ketimpangan gender pada konsumsi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia”, tepat pada waktunya.

Skripsi ini dimaksudkan untuk menambah wacana mengenai pengembangan perikanan sekaligus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi sehingga banyak pihak yang terlibat dalam membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya berkat sepanjang hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas perlindungan, kesehatan serta harapan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Perengki, SE, M.Sc.Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE,M.Si selaku kepala departemen Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Yewiwati, SE, ME selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE,M.Si dan Bapak Maizul Rahmizal, SE.,M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, masukan yang mendukung, dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang , khususnya departemen Ilmu Ekonomi beserta seluruh karyawan/i yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Terimakasih atas layanan dan perhatian yang diberikan kepada penulis.
8. Kak Asma Lidya, Amd selaku admin departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua, bapak Dasril dan ibu Wismawati yang turut mendukung penulis baik secara finansial, motivasi maupun doa tulus dari awal sampai ditahap akhir perkuliahan.
10. Kepada abang, kakak dan adik yang juga turut mendukung penulis dalam segi motivasi, finansial, semangat, nasehat serta doa yang tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman- teman seperjuangan yang turut bekerja sama dan saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketebatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan, saran serta kritikan yang membangun kepada pembaca agar kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca ataupun diri penulis sendiri.

Padang, Agustus 2025

Penuli

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Landasan Teori.....	17
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Konseptual	46
D. Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	50
B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Variabel Penelitian	51
E. Defenisi Operasional.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	62
1. Geografis Indonesia.....	62
2. Gambaran Jumlah Penduduk di Indonesia	63
B. Hasil Penelitian	63
1. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	63
2. Analisis Induktif	78
C. Pembahasan.....	90
1. Pengaruh Ketimpangan Gender pada Bidang Kesehatan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif	90

2. Pengaruh Ketimpangan Gender pada Pendidikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	94
3. Pengaruh Ketimpangan Gender pada Konsumsi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Rasio Keluhan Kesehatan dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia 2013-2023	8
Gambar 1.3	Rasio Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia 2013-2023	11
Gambar 1.5	Rasio Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia 2013-2023	13
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Indonesia 2013-2023	65
Tabel 3.2 Rasio Keluaha Kesehatan Provindi Indonesia 2013-2023.....	69
Tabel 3.3 Rasio Rata-rata Lama Sekolah Provinsi di Indonesia 2013-2023.....	71
Tabel 3.5 Rasio Pengeluaran PerKapita Provinsi di Indonesia 2013-2023	75
Tabel 3.6 Hasil Uji CEM	79
Tabel 3.7 Hasil Uji FEM.....	80
Tabel 3.8 Hasil Uji REM	80
Tabel 3.9 Hasil Uji <i>Chow</i>	81
Tabel 3.10 Hasil Uji Hausman	82
Tabel 3.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	83
Tabel 3.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	104
Lampiran 1.2 Rasio Keluhan Kesehatan.....	105
Lampiran 1.3 Rasio Rata-rata lama sekolah	106
Lampiran 1.4 Rasio Pengeluaran perkapita	107
Lampiran 1.5 Data Olahan Regresi data panel Menggunakan STATA 14.....	108
Lampiran 1.6 Panel Least Square.....	112
Lampiran 1.7 Fixed Effect regression Model	112
Lampiran 1.8 Random Effect regression Model	112
Lampiran 1.9 Uji Chow.....	113
Lampiran 1.10 Uji Hausman	113
Lampiran 1.11 Uji Multikolinearitas	113
Lampiran 1.12 Uji Heteroskedastisitas	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu hal yang penting dan seharusnya dilakukan oleh semua negara. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan ekonomi, pada mulanya hanyalah suatu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Todaro & Smith (2020) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses yang bersifat multidimensi, yang mencakup perubahan besar dalam masyarakat, seperti transformasi struktural sosial, kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan.

Realitasnya, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh sejumlah negara berkembang tidak mampu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran bahkan lebih buruk. Fakta tersebut mendorong perubahan arah pembangunan, dimana pembangunan ekonomi seharusnya lebih berfokus pada kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan sehingga diperlukan paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif.

Klasen (2010) mendefinisikan pembangunan inklusif adalah pembangunan dan pertumbuhan yang menghendaki adanya partisipasi dari semua pihak agar secara adil berperan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga ketika perekonomian tumbuh, maka akan diikuti oleh penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memikirkan bahwa paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif. Indeks pembangunan/Pertumbuhan inklusif yang telah dikeluarkan berbagai instansi internasional, dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik karena tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan (gender, wilayah dan pendapatan) dan beberapa indikator pembangunan Indonesia lainnya (Bappenas, 2019).

Indonesia, melalui Bappenas, kemudian mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk itu pula, pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada tahun 2019 yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang fokus untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dibentuk untuk mengukur tingkat inklusif dari Pembangunan di Indonesia melalui 3 aspek yaitu

pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta terakhir akses dan kesempatan dan dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar provinsi/kabupaten/ kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk setiap provinsi dan keselarasannya dengan tingkat nasional. Indeks terbentuk dari 21 indikator, 8 sub pilar, dan 3 pilar. Pilar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Adapun pilar kedua adalah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Sementara pilar ketiga merupakan perluasan akses dan kesempatan. Adapun pengukuran IPEI menghasilkan skala nilai pada rentang 1-10, di mana nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”. Kategori ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan ekonomi di wilayah tersebut masih sangat rendah. Terdapat ketimpangan signifikan dalam distribusi manfaat pembangunan, dan akses terhadap kesempatan ekonomi masih sangat terbatas bagi sebagian besar masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dan intervensi kebijakan yang mendalam untuk memperbaiki situasi. Nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan”. Nilai dalam rentang ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang cukup baik. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, secara umum, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi, dan ketimpangan mulai berkurang. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan agar mencapai tingkat pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Nilai 8-10 merupakan kategori “sangat memuaskan”. Kategori ini mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah tersebut telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.

Terdapat pemerataan yang signifikan dalam distribusi manfaat pembangunan, dan hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi. Wilayah dengan skor ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia Tahun 2013-2023

No.	Nama Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	$\bar{x}$
1	Aceh	4,68	4,78	4,87	5,38	5,56	5,53	5,74	5,46	5,73	5,88	6,02	5,42
2	Sumatera Utara	5,42	5,69	5,82	5,99	6,12	6,07	6,34	5,95	6,34	6,60	6,67	6,09
3	Sumatera Barat	5,31	5,47	5,72	6,00	5,98	5,93	6,15	5,67	6,17	6,38	6,45	5,93
4	Riau	5,05	5,16	5,21	5,50	5,66	5,70	5,86	5,67	6,19	6,32	6,46	5,71
5	Jambi	5,12	5,17	5,21	5,40	5,51	5,64	5,76	5,43	5,87	6,02	6,03	5,56
6	Sumatera Selatan	5,02	5,05	5,38	5,67	5,83	5,70	5,87	5,55	5,97	6,14	6,31	5,68
7	Bengkulu	4,97	5,21	5,30	5,51	5,54	5,51	5,75	5,52	5,95	6,12	6,19	5,60
8	Lampung	5,03	5,13	5,26	5,44	5,64	5,59	5,84	5,48	5,95	6,11	6,24	5,61
9	Bangka Belitung	5,59	5,67	5,96	6,24	6,20	6,18	6,23	5,83	6,49	6,75	7,00	6,19
10	Kepulauan Riau	6,02	5,96	6,35	6,36	6,34	6,44	6,58	6,18	6,66	6,75	6,95	6,42
11	DKI Jakarta	6,56	6,71	7,00	7,26	7,36	7,66	7,88	7,19	7,79	7,93	7,94	7,39
12	Jawa Barat	5,28	5,45	5,69	5,89	5,96	6,03	6,18	5,63	6,02	6,27	6,22	5,87
13	Jawa Tengah	5,60	5,77	5,95	6,14	6,34	6,26	6,51	6,01	6,43	6,58	6,64	6,20
14	DI Yogyakarta	6,08	6,20	6,22	6,39	6,50	6,50	6,69	6,13	6,63	6,63	6,71	6,43
15	Jawa Timur	5,59	5,73	5,73	5,99	6,11	6,13	6,37	5,93	6,31	6,47	6,52	6,08
16	Banten	5,16	5,19	5,34	5,57	5,59	5,60	5,95	5,48	6,09	6,31	6,39	5,70
17	Bali	6,20	6,29	6,54	6,75	6,54	6,64	6,82	5,60	6,23	6,82	7,04	6,50
18	Nusa Tenggara Barat	4,87	4,98	5,73	5,57	5,32	5,04	6,00	5,71	6,06	6,30	6,19	5,61
19	Nusa Tenggara Timur	4,06	4,24	4,26	4,57	4,80	4,82	4,97	4,65	5,24	5,48	5,63	4,79
20	Kalimantan Barat	4,66	4,78	4,96	5,22	5,18	5,31	5,55	5,27	5,79	5,96	5,99	5,33
21	Kalimantan Tengah	5,03	5,17	5,51	5,63	5,82	5,74	5,97	5,59	6,12	6,30	6,41	5,75
22	Kalimantan Selatan	5,33	5,47	5,67	5,97	6,01	5,92	6,14	5,75	6,24	6,32	6,49	5,94
23	Kalimantan Timur	5,54	5,33	5,72	5,85	6,04	5,96	6,22	5,77	6,24	6,47	6,79	5,99
24	Kalimantan Utara	5,26	5,37	5,45	5,67	5,88	6,04	6,17	5,55	6,22	6,37	6,54	5,87
25	Sulawesi Utara	5,17	5,32	5,58	5,74	5,83	5,78	6,16	5,65	6,15	6,45	6,41	5,84
26	Sulawesi Tengah	4,76	4,77	5,36	5,41	5,44	5,38	5,72	5,86	6,41	6,77	6,81	5,70
27	Sulawesi Selatan	5,13	5,32	5,42	5,57	5,73	5,77	6,04	5,56	6,11	6,34	6,31	5,76
28	Sulawesi Tenggara	4,86	4,95	5,23	5,55	5,64	5,53	5,81	5,50	6,02	6,19	6,33	5,60
29	Gorontalo	4,45	4,69	4,80	5,19	5,15	5,26	5,57	5,25	5,61	5,70	5,75	5,22
30	Sulawesi Barat	4,49	4,77	4,82	5,14	5,17	5,12	5,43	4,99	5,67	5,70	6,06	5,21
31	Maluku	4,25	4,57	4,76	5,02	5,13	5,12	5,44	5,09	5,63	5,85	5,95	5,17
32	Maluku Utara	4,62	4,66	4,93	5,25	5,28	5,29	5,42	5,42	6,30	6,78	6,82	5,52
33	Papua Barat	4,12	4,27	4,52	4,84	4,91	5,18	5,32	5,01	5,19	5,47	5,84	4,97
34	Papua	2,60	2,78	3,03	3,33	3,44	3,66	3,22	3,58	4,14	3,84	4,04	3,42
Indonesia		5,11	5,24	5,42	5,66	5,76	5,77	5,97	5,54	6,00	6,13	6,17	5,71

Sumber: BAPPENAS, 2023

Pembangunan ekonomi inklusif Indonesia menurut Provinsi pada 2013–2023 mengalami perubahan tiap tahunnya. Jumlah provinsi dengan tingkat inklusifitas yang berada diatas rata – rata inklusifitas nasional berjumlah 17 provinsi yang sebagian besarnya berada di Indonesia bagian barat dan tengah yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi dengan tingkat inklusifitas dibawah rata – rata indonesia yaitu berjumlah 17 provinsi yang dominan berada di indonesia bagian timur yaitu, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum provinsi-provinsi di Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. Walaupun masih ada kendala seperti belum bisa di katakan inklusif, ketimpangan antar wilayah dan disparitas pendapatan, pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang berarti dalam usaha mencapai pembangunan yang inklusif. ini juga menjadi fondasi penting untuk memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata serta juga perlu adanya upaya dalam peningkatan perekonomian inklusif.

Provinsi yang memiliki rata rata tingkat inklusifitas yang tinggi yaitu DKI Jakarta dengan tingkat inklusifitas yang berada di atas rata – rata dari provinsi – provinsi lain di Indoneisa setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,56, pada tahun 2014 sebesar 6,71, pada tahun 2015 sebesar 7,00, pada tahun 2016 sebesar 7,26, pada tahun 2017 sebesar 7,36, pada tahun 2018 sebesar 7,66, pada tahun 2019 sebesar 7,88 pada tahun 2020 sebesar 7,19 pada

tahun 2021 sebesar 7,79 pada tahun 2022 sebesar 7,93, pada tahun 2023 sebesar 7,94 dan masuk kedalam kategori memuaskan. Pencapaian nilai memuaskan inklusivitas pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta dikarenakan provinsi ini memiliki potensi sumber daya yang cukup besar memiliki pilar pertumbuhan yang baik, pemerataan pembangunan yang merata berbeda dengan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan juga tidak didukung dengan pemerataan pembangunan seperti Provinsi Papua dengan tingkat inklusivitas terendah di Indonesia berdasarkan provinsi dengan rata – rata tingkat inklusivitas 3,42 setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi inklusif Papua mengalami peningkatan walaupun masih dibawah target nasional. Pada tahun 2013, sebesar 2,60, pada tahun 2014 sebesar 2,78, pada tahun 2015 sebesar 3,03, pada tahun 2016 sebesar 3,33, pada tahun 2017 sebesar 3,44, pada tahun 2018 sebesar 3,66, pada tahun 2019 sebesar 3,22, pada tahun 2020 sebesar 3,58, pada tahun 2021 sebesar 4,14, pada tahun 2022 sebesar 3,84, pada tahun 2023 sebesar 4,04, dan masuk kategori tidak memuaskan. Kategori tidak memuaskan ini berarti bahwa pembangunan ekonomi inklusif di daerah tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu memberikan akses yang cukup merata kepada masyarakat terhadap peluang ekonomi, sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius dan terfokus untuk memperbaiki pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

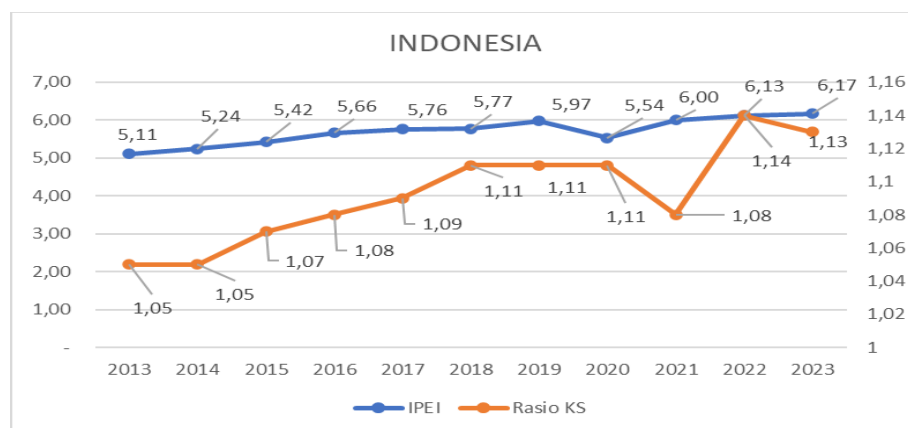
Ketimpangan gender salah satu permasalahan yang selalu dihadapi seluruh negara di dunia, terutama di Indonesia. Ketimpangan gender merupakan kondisi dimana adanya gap atau ketidaksetaraan dalam struktur sosial masyarakat. Komitmen tentang pengarusutamaan gender terlihat melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Strategi ini mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan dan program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Meski ada kemajuan dalam mencapai kesetaraan, kenyataan menunjukkan bahwa diskriminasi gender masih terjadi di berbagai aspek kehidupan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketimpangan gender dapat diamati melalui nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dengan rentang nilai 0-100 persen. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui ketimpangan gender maka kesenjangan nilai IPG dapat digunakan.

Dengan demikian, jelas bahwa pengurangan ketimpangan gender merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan seperti yang dicanangkan oleh UNDP. Dengan demikian, Indeks pembangunan gender (IPG) penting untuk diintegrasikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Indeks pembangunan gender menggabungkan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dalam aspek pembangunan.

Menurut laman resmi Badan Pusat Statistik (2017) Indonesia, Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik (sesak nafas, panas, *diare*, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, gangguan kesehatan karena kecelakaan) maupun jiwa (depresi, gelisah, ketakutan, trauma, *skizofrenia*), termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari yang dilaporkan kepada layanan kesehatan.

Jika ketimpangan gender pada sektor kesehatan meningkat maka IPEI dapat menurun, dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak inklusif. Dengan demikian keluhan kesehatan, dapat dijadikan untuk melihat ketimpangan gender dalam aspek kesehatan dengan meningkatkan kesetaraan gender diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif.



Gambar 1.2 Rasio Keluhan Kesehatan dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, 2013-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

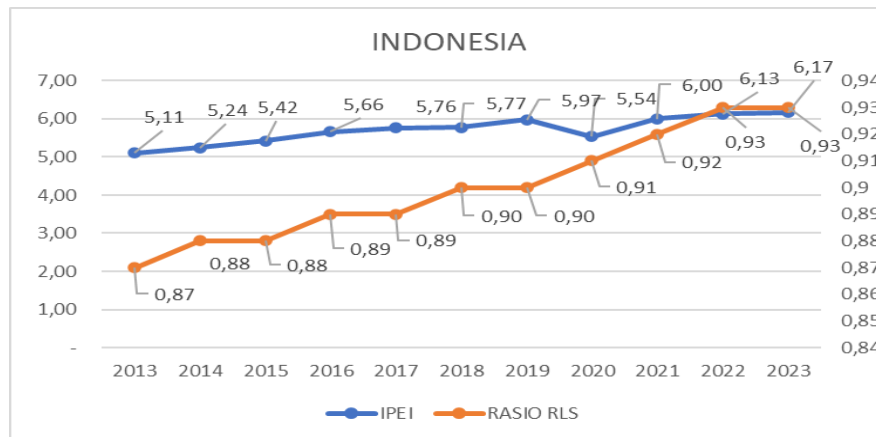
Dalam gambar 1.2, Rasio keluhan kesehatan menggambarkan perbandingan persentase penduduk perempuan yang melaporkan mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Rasio Persentase Penduduk

yang mempunyai Keluhan Kesehatan perempuan/laki-laki di Indonesia mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari 2013-2023. Dimana nilai Rasio KS >1 menandakan bahwa keluhan kesehatan lebih tinggi dialami oleh perempuan, yang dapat mencerminkan adanya ketimpangan dalam aspek akses, layanan, atau kondisi kesehatan gender. Perempuan secara konsisten melaporkan keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dimulai dari angka 1,05 pada tahun 2013, Rasio KS meningkat secara signifikan hingga mencapai angka tertinggi sebesar 1,144 pada tahun 2022. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 1,13. Tahun 2014 mencatatkan Rasio KS terendah yaitu sebesar 1,05. Pada tahun yang sama, IPEI tercatat sebesar 5,24. Nilai Rasio KS yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pada periode tersebut ketimpangan keluhan kesehatan antara perempuan dan laki-laki relatif kecil. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek kesehatan gender, di mana meskipun pembangunan ekonomi inklusif meningkat, kesetaraan akses layanan dan hasil kesehatan antara perempuan dan laki-laki masih belum optimal.

Ini dapat diinterpretasikan bahwa akses dan kondisi kesehatan antara gender berada dalam kondisi yang hampir setara. Pada tahun 2022 terdapat permasalahan. Dimana saat Rasio Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan perempuan/laki-laki mengalami peningkatan tinggi justru pembangunan ekonomi inklusif mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan teori yang berlaku sehingga munculah sebuah fenomena yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Usman & Lestari (2018) mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pendidikan. Jika kesetaraan gender dalam pendidikan tidak tercapai, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi akan terus terhambat. Kesenjangan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan teori Modal Manusia, yang menyatakan bahwa perempuan memperoleh modal manusia yang lebih sedikit atau berbeda dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini menyebabkan perempuan menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki (Laili & Damayanti, 2018).

Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) perempuan/laki-laki merupakan perbandingan antara pencapaian penduduk perempuan terhadap laki-laki terhadap pencapaian pendidikan yang ditempuh. Penurunan dari Rasio rata-rata lama sekolah akan menghambat peluang untuk meraih pendidikan yang layak. Sehingga Penurunan mencerminkan peningkatan ketimpangan gender dan begitu juga sebaliknya. Jika ketimpangan gender meningkat maka IPEI dapat menurun, dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak inklusif. Dengan demikian RRLS, dapat dijadikan untuk melihat ketimpangan gender dalam aspek pendidikan dengan meningkatnya RRLS diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif.



Gambar 1.3 Rasio Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia 2013-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

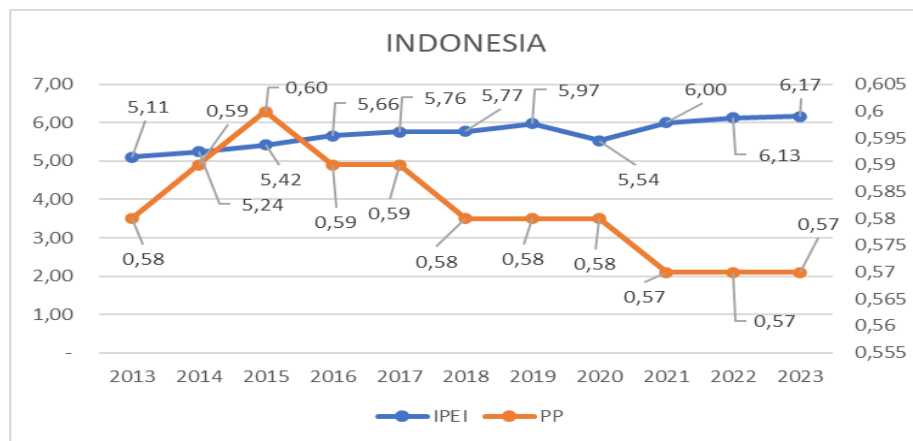
Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil. Peningkatan rasio ini menunjukkan adanya kemajuan dalam hal kesetaraan gender di sektor pendidikan, di mana perempuan semakin mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Pada gambar 1.3, RRLS tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,93 diiringi dengan IPEI pada tahun 2023 sebesar 6,17 yang masuk kedalam kategori memuaskan yang berarti kesetaraan gender hampir tercapai dan diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Rasio rata-rata lama sekolah terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,90 diiringi dengan IPEI pada tahun 2018 sebesar 5,77 dan masuk kedalam kategori memuaskan, angka ini hampir mencapai kesetaraan gender namun masih perlu adanya upaya perbaikan agar tercapai secara merata, sehingga ketimpangan gender pada pendidikan bisa dihilangkan. Pada tahun 2020 terdapat permasalahan. Dimana saat Rasio Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan justru pembangunan ekonomi inklusif mengalami

penurunan begitu juga sebaliknya, hal ini bertolak belakang dengan teori yang berlaku sehingga munculah sebuah fenomena yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Rendahnya partisipasi penduduk terhadap pendidikan akan menghambat produktivitas tenaga kerja. Rendahnya produktivitas angkatan kerja akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan dapat mengurangi rata-rata angkatan kerja karena adanya perbedaan atau kesenjangan upah yang dialami oleh perempuan dan hal ini berefek menghambat pertumbuhan ekonomi (Pervaiz et al., 2012). Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi struktur ketenagakerjaan, tetapi juga tercermin dalam pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki. Perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan formal cenderung memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan pengeluaran per kapita perempuan lebih kecil, yang berdampak pada tingkat kesejahteraan individu secara keseluruhan. Ketimpangan ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi antar gender, sehingga memperlambat upaya pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pengeluaran perkapita adalah komponen yang dipakai untuk menilai status kondisi pembangunan manusia suatu wilayah dan memperlihatkan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat (Yunita, 2012). Dengan meningkatnya Pengeluaran perkapita maka ini dapat menjadi usaha atau strategi sebagai upaya meningkatkan laju Pembangunan

ekonomi yang inklusif. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator yang mencerminkan secara langsung hasil dari pembangunan ekonomi. Di Indonesia, indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan sejauh mana individu mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, pengeluaran per kapita tidak hanya merepresentasikan pola konsumsi, tetapi juga mencerminkan distribusi manfaat pembangunan di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk perbedaan berdasarkan gender.



Gambar 1.5 Rasio Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia 2013-2023

Pada gambar 1.5, diketahui bahwasanya Rasio Pengeluaran Perkapita perempuan terhadap laki-laki mengalami kenaikan dan penurunan di satu waktu. Namun pada gambar 1.5 dapat disimpulkan bahwa pengeluaran perkapita didominasi oleh laki-laki, hal ini berarti ketimpangan gender pada sektor konsumsi masih belum setara. Pada tahun 2015, RPP tertinggi sebesar 0,60 yang berarti pengeluaran perkapita perempuan hanya 60% dari pengeluaran laki-laki 100%, hal ini masih jauh dari kesetaraan gender, diiringi

dengan IPEI sebesar 5,42 yang masuk kedalam kategori memuaskan. RPP terendah terjadi pada tahun, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 0,5, hal ini memperburuk ketimpangan gender pada konsumsi. Pada data RPP dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender pada sektor ekonomi masih cukup tinggi. Dimana pengeluaran perkapita perempuan jauh dibawah pengeluaran perkapita laki-laki. Pada tahun 2017, 2020 dan 2021 terdapat permasalahan. Dimana saat Rasio Pengeluaran Perkapita mengalami penurunan justru pembangunan ekonomi inklusif mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, hal ini bertolak belakang dengan teori yang berlaku sehingga munculah sebuah fenomena yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Sebagaimana terdapat di dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadila Dwi Adika & Farida Rahmawati menunjukkan dalam penelitiannya bahwa variabel ketimpangan gender di bidang kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup laki-laki dan perempuan (AHH), variabel pendidikan dengan indikator Rata- Rata Lama Sekolah laki-laki dan perempuan (RLS) dan Pengeluaran Perkapita dari perempuan akan berpengaruh pada IPEI daripada AHH, RLS dan Pengeluaran Perkapita dari laki-laki (Adika & Rahmawati, 2021).

Beberapa temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Lawanson & Umar (2019), yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia telah mengkaji pengaruh ketimpangan gender terhadap pembangunan ekonomi, namun para

peneliti tersebut belum fokus pada aspek keinklusan dari pembangunan ekonomi tersebut dan masih terbatasnya referensi yang membahas pengaruh ketimpangan gender terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kesetaraan gender dalam berbagai aspek dan ekonomi inklusif secara mendalam untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan latar belakang ini, penelitian atau kajian dengan judul **“Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia”** menjadi relevan untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sejauh mana pengaruh Ketimpangan gender pada kesehatan (GL) terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia ?
2. Sejauh mana pengaruh Ketimpangan gender pada pendidikan (GE) terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia ?
3. Sejauh mana pengaruh Ketimpangan gender pada konsumsi (GC) terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia ?
4. Sejauh mana pengaruh Ketimpangan gender pada kesehatan, Ketimpangan gender pada pendidikan, Ketimpangan gender pada konsumsi terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada kesehatan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada pendidikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada konsumsi terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan gender pada kesehatan, Ketimpangan gender pada pendidikan, Ketimpangan gender pada konsumsi terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang serta untuk menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
3. Bagi pengambilan kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi masalah indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

4. Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan untuk meneliti mengenai kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi inklusif.
5. Bagi mahasiswa dan kalangan akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademis bagi pembaca dalam pembelajaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan Stata 14, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio keluhan kesehatan perempuan terhadap laki-laki (GH) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan terlibat secara partisipatif dalam sistem kesehatan, yang mencerminkan responsivitas sistem pembangunan terhadap kelompok rentan. Rasio keluhan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini sejalan dengan kerangka teori pembangunan inklusif dan human capital theory dari Becker dan Schultz, yang menekankan pentingnya akses yang merata dalam layanan kesehatan untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki (GE) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Temuan ini memperkuat pandangan Todaro dan teori modal manusia bahwa peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi perempuan, dapat memberikan efek berantai terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pengurangan ketimpangan antar gender dalam jangka panjang.
3. Rasio pengeluaran per kapita perempuan terhadap laki-laki (GC) sebagai indikator akses konsumsi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Meskipun angka ketimpangan dalam pengeluaran masih tinggi secara absolut, peningkatan rasio konsumsi perempuan di beberapa wilayah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Temuan ini mendukung teori human investment, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ekonomi individu dalam menciptakan multiplier effect terhadap pembangunan.

4. Ketimpangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan konsumsi memiliki pengaruh yang Negatif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini secara keseluruhan membuktikan bahwa ketimpangan gender memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.

B. Saran

1. Melihat terdapat pengaruh ketimpangan gender pada kesehatan terhadap pembangunan ekonomi inklusif disarankan kepada pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan ekonomi secara inklusif untuk semua merasakan tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki.
2. Melihat terdapat pengaruh ketimpangan gender pada pendidikan, terhadap pembangunan ekonomi inklusif disarankan kepada pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

ekonomi secara inklusif untuk semua merasakan tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki.

3. Melihat terdapat pengaruh ketimpangan gender pada konsumsi terhadap pembangunan ekonomi inklusif disarankan kepada pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara inklusif untuk semua merasakan tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki
4. Pengumpulan dan publikasi data yang lebih terpilah menurut jenis kelamin secara rutin dan komprehensif sangat penting untuk memantau perkembangan ketimpangan gender dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2006). Indonesia Country Gender Assessment. Manila.
- Aktaria, E. and Handoko, B. S. (2012) 'Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), pp. 194–206. doi: 10.23917/jep.v13i2.168.
- Amalia, AM, Rahmawati, F., & Putri, IND (2023). Pengaruh Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Penelitian Bisnis, Perpajakan, dan Ekonomi Terapan* , 2 (5), 546-559.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 23(1).
- Asnawi, S.K., & Wijaya, C. (2010). *Pengantar Valuasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Azizah, M., Rika Rahayu, RR, & Maryam, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Inklusivitas Pembangunan Di Pulau Jawa. *Konferensi Internasional Bisnis dan Ilmu Sosial* , 2 (1), 984. Diakses dari <https://ojsicobuss.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/269>
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (2022). *Kajian Pengarusutamaan Gender: Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah* https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1660884304_pug.pdf
- Badan Pusat Statistik (2013) *Metodologi Indeks Pembangunan Gender (IPG)*. Available at: <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (2023) *Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>
- Badan Pusat Statistik (2023) *Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2013-2023*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/40/461/1/pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun), 2013-2023*. Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/40/459/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Cabeza-García, L., Del Brio, E. B. and Oscanoa-Victorio, M. L. (2018) 'Gender factors and inclusive economic growth: The silent revolution', *Sustainability* (Switzerland), 10(121), pp. 1–14. doi: 10.3390/su10010121.

- Cameron, L., Suarez, DC, & Rowell, W. (2020). Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia: Mengapa hal ini terhenti. *Mencapai Pertumbuhan Inklusif di Asia Pasifik*, 241.
- Deris, L. R. V., Bhinadi, A., & Nuryadin, D. (2022). Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia (34 provinsi) tahun 2015-2020. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2947-2958.
- Diayu, U. (2019). "Analisis Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita Di Indonesia Tahun 2010-2017" Skripsi Politeknik Statistika STIS, Jakarta
- Diaurrochmah, F., & Mulyanto, M. (2021). Analisis Indeks Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 178-195.
- Dyah Hapsari, S.A., Hutagaol, M.P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan Inklusif : Fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2).
- Fajriyyah, N., & Budiantara, IN (2015). Pemodelan indeks pembangunan gender dengan pendekatan regresi nonparametrik spline di Indonesia. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 4 (2), 2337-3520.
- ILO. (2020, September). Kesenjangan Upah Berbasis Gender di Indonesia
- Ghojagh, H. M. N., Agheli, L., Dizaji, S. F., & Kabir, M. J. (2023). Economic development and health status in Iran: a panel data analysis. *Environmental and Sustainability Indicators*, 17, 100221.
- Gorman, Bridget K dan Jenan Ghazal Read. 2007. Why Man Die Younger Than Woman. http://www.medscape.com/viewarticle/555221_2
- Gupta, K., & Mardjono, E. S. (2021). Indonesia emas berkelanjutan 2045: Kumpulan pemikiran pelajar Indonesia sedunia seri 1 ekonomi.
- Harahap, R (2014). "Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah". Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haridinata, I. (2019). Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan. *Skripsi*. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.I26.1.78>
- Hidayah, Z. M., & Rahmawati, F. (2020). Menelusur Relasi Indikator Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*,
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pusat Statistik (2016) Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi. Jakarta.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI). (2021a). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021. In S. Anggraini, A. P. Bungsu, Nurhayati, & W. Bodromurti (Ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- KPPPA. (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019', Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian PPN/BAPPENAS (2018) Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Available at: <http://inklusif.bappenas.go.id/indeks> (Accessed: 26 July 2020).
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158-180.
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2008). Dampak Ketimpangan Gender dalam Pendidikan dan Pekerjaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Pembaruan dan Perluasan. Makalah Diskusi IAI, No. 175
- Klasen, Stephen. 2010. *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. ADB Sustainable Development Working Paper Series
- Krysovaty, Andriy, Olena Ptashchenko, Oleksii Kurtsev, and Arutyunyan Ovagim. "The concept of inclusive economy as a component of sustainable development." *Problemy Ekorozwoju* 19, no. 1 (2024).
- Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan upah antargender di Indonesia: Bukti empiris di sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(3), 1.
- Lawanson, OI, & Umar, DI (2019). Ketimpangan gender dan implikasinya terhadap pertumbuhan inklusif di Nigeria dari tahun 1980 hingga 2018.
- Lukiswati, I., Djuraidah, A., & Syafitri, U. D. (2020). Analisis Regresi Data Panel Pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(1), 89-96.
- Mufidah, N. D. (2020). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Negara Asean. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Mudzakir, A. M., & Rahmadini, S. (2024). DOES GENDER EQUALITY IMPACT REGIONAL ECONOMIC GROWTH?: A CASE STUDY IN WEST JAVA PROVINCE USING ECONOMETRIC ANALYSIS. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 252-271.

- Nazmi, L. and Jamal, A. (2018) 'Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia', 3(4), pp. 740–750. Available at: <http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/10627>.
- Novtaviana, W. I. N. D. A. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Indonesia Tahun 2014-2018. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*.
- Nurkholis, A. (2018). *Teori pembangunan sumberdaya manusia: Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory* (No. 8trv7_v1). Center for Open Science.
- Padang, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 969-976.
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61.
- Pervaiz, Z., Irfan, M., Ahmad, S., Irfan Chani, M., Ahmad Jan, S., & Chaudhary, AR (2012). Ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi: analisis deret waktu untuk Pakistan. 37176.
- Pratiwi, I. E. (2003). *Determinan Gender Dan Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Wilayah 3t (Terdepan Terluar Tertinggal)* (Bachelor's thesis).
- Pritchett, L. (2001). Where Has All the Education Gone? *The World Bank Economic Review*, 15(3), 367–391.
- Rahmadi, S. (2021). Analisis kluster Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi berdasarkan indikator pembangunan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 267-278.
- Rahmawati, F. and Hidayah, Z. M. (2020) 'Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), p. 110. doi: 10.24252/ecc.v7i1.13919.
- Ramadhan, RR, & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh modal fisik dan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17 (2), 109-124.
- Ramandani, H. N. (2024). Analisis Determinan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Dan Desentralisasi Fiskal Pada Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 8(02), 172-180.

- Randa, N. A., & Sentosa, S. U. (2020). Analisis Kausalitas Antara Ketimpangan Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 37-42
- Rofatunnisa, S., & Usman, H. (2024). Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketimpangan Gender di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 15-32.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40156/perpres-no-12-tahun-2013>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136. <https://peraturan.bpk.go.id/details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*. (Tanggal ditetapkan: 6 Januari 2022) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195699/inpres-no-1-tahun-2022>
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135941/perpres-no-18-tahun-2020>
- RPJMN 2020-2024 (2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Available at: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi_RPJMN_IV_2020-2024_Revisi_14_Agustus_2019.pdf.
- Santosa, P. B., & Hamdani, M. (2007). *Statistika deskriptif dalam bidang ekonomi dan niaga*. Jakarta: Erlangga
- Sari, I. P. (2019). *Polemik Pengarusutamaan Kesenjangan Gender di Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, 19(2). <https://doi.org/10.15575/jpiu.v19i2.12205>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American economic review*, 51(1), 1-17.
- Sejati, A. (2024). *Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Nasution, M., Dewi, M., Sianturi, R., & Rozaini, N. (2024). Pengaruh Pengeluaran Perkapita Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan 2010-2021. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).
- Sitorus, D. W. (2025). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi Dan Tingkat Pendidikan (Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi) Di Indonesia 2013-2023 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Sitorus, AV (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (The impact of gender inequality in economic growth in Indonesia). *Sosio Informa*, 2, 89–101.
- Suratinoyo, R. F. *Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Indikator Sumber Daya Manusia Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017-2021* (Bachelor's thesis, PERPUSTAKAAN FEB UIN JAKARTA).
- Swastika, S. U., & Arifin, Z. (2023). Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(03), 449-464.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2003) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. 8th edn. Edited by W. C. Kristiaji. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith. (2016). *Pembangunan ekonomi*, Edisi sebelas, Erlangga: Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12 ed.). Harlow, Essex Pearson Education Limited.
- Tambunan, T. T. H. (2016) *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta: LP3ES.
- UNDP. (2020). Catatan teknis: Laporan Pembangunan Manusia 2020.
- United Nation Development Programme (UNDP) (2015) *Sustainable Development Goals*. Available at: <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>
- Usman, H., & Lestari, F.C. (2018). Gender equality and economic development. *KnE Social Sciences*, 3(10), 230. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2914>
- Vellala, P. S., Madala, M. K., & Chhatopadhyay, U. (2016). The development of composite index for inclusive economic growth: An Indian perspective. *Journal of Economic & Management Perspectives*, 10(4), 454-471.
- Vininda, S. and Yuliana, L. (2015) 'Penerapan Regresi Data Panel Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Periode 2011-2015', *Seminar Nasional Official Statistics*

2019: *Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*, 2015, pp. 549–559. Available at: <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/416/145>.

- Widiyawati, dkk (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender. Proceeding PESAT. Bandung.
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. *Lentera*, 17(1).
- World Economic Forum (2020) *Global Gender Gap Report 2020*. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
- World Health Organization. (2019). Indonesia: gender dan kesehatan.
- WHO. 2009. “Promoting Gender Equality to Prevent Violence against Women.” World Health Organization, 1–18.
- World Tourism Organization (UN WTO). (2019). *Global Report on Women in Tourism—Second Edition*. UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284420384>
- Yunani, A., & Maulida, S. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dari Berbagai Aspek Ekonomi. Undiknas Bali.
- Yuni, A. (2022). *Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). Sumber: Hasil Olah Data Stata 14, 2025